



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. ROHANA KUDUS Telp. 0756 -21509
PAINAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMBUATAN BUKU LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (LSLHD)

TAHUN ANGGARAN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Kegiatan	:	Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)
Organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2017

A. LATAR BELAKANG

Strategi lingkungan dan pembangunan, sebagai hasil dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Dan Pembangunan (The United Nations Conference On Environment And Development — UNCED) di Rio de Janeiro, 1992 yang dituangkan dalam Agenda 21, telah menggaris bawahi pentingnya ketersediaan informasi di segala aspek lingkungan dan pembangunan. Hal ini ditindaklanjuti pada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 yang juga dilaksanakan di Rio de Janeiro (Rio+20) dengan slogan 'future we want', untuk mengatasi berbagai tantangan baru yang terus berkembang bagi pengambil keputusan menuju pembangunan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan pasal 62 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah baik nasional maupun daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan kebijakan perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup, serta menyebarkanluaskannya kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup tersebut setidaknya memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal. Selanjutnya, pasal 63 ayat (3) menyebutkan bahwa kabupaten/kota bertugas dan berwenang mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota. Adapun bentuk informasi tersebut dituangkan dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup (SLH).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tersirat bahwa tersedianya SLH kabupaten dan kota merupakan sumber penting bagi penyusunan SLH provinsi. SLH provinsi merupakan sumber penting bagi penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup nasional yang pada waktunya akan dijadikan sebagai salah satu masukan bagi penyusunan laporan status Lingkungan Hidup Regional ASEAN, Asia Pasifik dan Lingkungan Global (Global Environmental Outlook).

Pelaksanaan otonomi daerah akan mengakibatkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi maupun politik masyarakat. Konsekuensinya, penyusunan kebijakan harus dilakukan secara rasional, terpadu, serta memiliki akuntabilitas terhadap publik. Substansi dari kebijakan ini meliputi berbagai hal, antara lain penataan ruang, administrasi pertahanan, lingkungan hidup, infrastruktur publik, public finance, data dan informasi, pengelolaan sumber daya alam strategis dan berbagai kegiatan sosial ekonomi lainnya merupakan sumber daya pelaksanaan pembangunan di daerah.

Ada 2 (dua) peranan penting SLH dalam mendukung terlaksananya pelaksanaan desentralisasi. Pertama, Sebagai alat bantu scenario kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mempertimbangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek social dan ekologi secara berimbang. Kedua, sebagai alat bantu untuk memantau kinerja pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam dan lingkungan di suatu wilayah. Hal ini dilakukan melalui pemantauan berbagai fakta secara berkala, sehingga kecenderungan terhadap dampak lingkungan dapat diminimalkan. Untuk itu tersedianya basis data lingkungan yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya sangat krusial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- ✓ Tersedianya data dan informasi lingkungan sebagai sarana publik untuk berperan serta dalam melakukan pengelolaan lingkungan serta sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan.

- ✓ Tersedianya sumber informasi utama bagi rencana pembangunan berkelanjutan.
- ✓ Tersedianya informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan

2. Tujuan :

- ✓ Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
- ✓ Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- ✓ Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian tata praja lingkungan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya buku analisis SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
2. Tersedianya buku basis data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

D. LOKASI

Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan Buku Analis Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
2. Penyusunan Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada DLH Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/01/SK/DLH-PS/I/2017
4. Bendaharawan : Staf DLH Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/22/Kpts/BPT-PS/2017

Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

G. TEKNIS PELAKSANAAN

- a. Penetapan Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- b. Penetapan pihak ketiga pelaksana penyusunan buku analisis SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.
- c. Penyusunan buku analisis SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.
- d. Penyampaian buku analisis SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 ke Provinsi dan KLHK.
- e. Persiapan penyusunan buku data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017,
- f. Inventarisasi Data, Analisis dan Entry Data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- g. Penyusunan buku basis data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- h. Penyampaian buku basis data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ke Provinsi dan KLHK.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (terlampir).

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 104.995.452,-

J. INDIKATOR KINERJA

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama kegiatan | : Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) |
| 2. Pekerjaan | :
1. Pembuatan Buku Analisis Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.
2. Pembuatan Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 |
| 3. Masukan / Input | :
a. Jumlah Dana Rp. 104.995.452,-
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) |
| 4. Keluaran / Output | : Buku Analisis Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dan Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 |
| 5. Hasil / Result/ Outcome | : Informasi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 6. Manfaat / Benefit | : Tersedianya data pelayanan bidang lingkungan hidup |
| 7. Dampak | : Meningkatnya Pelayanan bidang lingkungan hidup |

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUATAN BUKU DATA STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan ADM kegiatan												
2.	Penetapan Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017												
3.	Penetapan pihak ketiga pelaksana penyusunan buku analisis SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016												
4.	Penyusunan buku analisis SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016												
5.	Penyampaian buku analisis SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 ke Provinsi dan KLHK												
6.	Persiapan penyusunan buku data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017												
7.	Inventarisasi Data, Analisis dan Entry Data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017												
8.	Penyusunan buku basis data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017												
9.	Penyampaian buku basis data SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ke Provinsi dan KLHK												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Februari 2017

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. Hj. Nelly Armidha, MM
NIP. 19581212 198911 2 001

Dibuat oleh :
PA Kegiatan Pembuatan Buku Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)

Ir. Hj. Nelly Armidha, MM
NIP. 19581212 198911 2 001